

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan daerah dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan. Perkembangan pariwisata di daerah juga erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi daerah. dampak positif yang dialami masyarakat sekitar adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja daerah. Saifullah mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata bermanfaat dalam beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, salah satunya untuk mendukung pengembangan wilayah, sosial budaya dan lingkungan.

Pengembangan pariwisata di suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi alam dan karakteristik budayanya. Pariwisata merupakan komoditi prospektif yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam pengembangan pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan, perencanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.¹

Fenomena otonomi daerah sedikit banyak berdampak signifikan terhadap sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Daerah-daerah yang minim potensi sumber daya alamnya berpeluang untuk meningkatkan margin pendapatan dari sektor lain seperti pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di daerah dengan sumber daya alam yang buruk dapat menjadi alternatif sumber pendapatan daerah. Yoeti mengemukakan bahwa sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial di masa depan.

Sejak tahun 1999, Kota Depok resmi menjadi daerah otonom sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Depok. Pengembangan Kota Depok

¹ Diah Pusporini, dkk., "Strategi Pengembangan Wisata di Situ Pengasinan Kota Depok," *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* Vol. 5, No. 2 (Oktober, 2013) Staff Badan Lingkungan Hidup Kota Depok, h. 20.

selanjutnya dicita-citakan sebagai kota penyeimbang ibu kota (*buffer zone*) dan mencakup pertumbuhan dan perkembangan sektor pariwisata.²

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mengikut sertakan masyarakatnya dalam pembangunan itu, sehingga masyarakat paham mengenai yang sedang dan akan dilakukan pemerintahannya untuk mereka. Dalam membangun dan mengembangkan pariwisata di suatu daerah tentu didasarkan pada kecerdasan seorang pemimpin untuk melihat kondisi daerahnya. Pariwisata adalah suatu jenis kegiatan perjalanan wisata dimana kegiatan pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi pembangunan sektor ini bisa dijadikan sebuah inspirasi untuk menghidupkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah berjalan selama ini.³

Pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara. Selain menjadi penyumbang devisa terbesar untuk negara, pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi untuk kegiatan produksi dan pendapatan nasional Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembangunan infrastruktur. Pengembangan pariwisata di daerah juga sangat bermanfaat bagi komunitas lokal dan para pelaku bisnis di daerah. Jika komunitas lokal dan para pelaku bisnis dapat bekerjasama dan berkontribusi dengan baik maka pariwisata di daerah dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut.⁴ Sebuah langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengembangan, pembinaan, serta pemberdayaan yang dilakukan di tempat wisata tersebut.

² Diah Pusporini, dkk., "Strategi Pengembangan Wisata di Situ Pengasinan Kota Depok," *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* Vo. 5, No. 2 (Oktober, 2013) Staff Badan Lingkungan Hidup Kota Depok, h. 18-21.

³ Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 34.

⁴ Muhammad Afdi Nizar, "Tourism Effect on Economic Growth in Indonesia," *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)* 7, No. 65628 (2015) Staf Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, h. 4-5.

Sebuah wisata tidak akan bisa maju dan berkembang apabila tidak ada yang menyokong dan melakukan pemberdayaan di dalamnya. Pemerintah bisa mulai melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar wisata tersebut karena tentu masyarakat sekitar wisata tersebut juga memerlukan bimbingan dan arahan serta dukungan dari pemerintah daerah tersebut untuk mengembangkan sebuah destinasi wisata yang ada di daerah mereka.

Masyarakat lokal merupakan bagian tidak terpisahkan dari destinasi pariwisata. Integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk memastikan masyarakat lokal mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Kerangka pemikiran integrasi dimulai dari pemahaman mendasar tentang destinasi pariwisata. Di dalam destinasi pariwisata tidak hanya terdapat industri pariwisata (produk, pasar, akses), melainkan juga ada keterkaitan dengan industri lain termasuk masyarakat lokal. Sehingga dapat dikatakan masyarakat lokal posisinya sangat strategis dan setara dengan pengambil keputusan lainnya dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan.⁵

Oleh karena itu, masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mengembangkan dan mendukung keberhasilan pada sebuah pembangunan. Masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam upaya mengembangkan serta mendukung sebuah pembangunan pada objek-objek wisata yang tentu memiliki program-program pembangunan yang sangat membutuhkan peran masyarakat sekitar wisata sebagai subjek atau pelaku pengembangan destinasi wisata tersebut.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam bertindak dan memilih bagi masyarakat miskin, tertekan, terbatas, dan yang tidak mampu menyampaikan hak suaranya. Terkadang kemiskinanlah yang membuat seseorang menjadi tidak berdaya dan merasa tidak mampu untuk menyampaikan suaranya. Dalam upaya memberdayakan masyarakat jika kita ingin memberdayakan masyarakat kita harus mampu dalam menghilangkan ketidakmampuan yang menjadi sebab mereka menjadi golongan yang tertinggal dan kita juga harus mampu

⁵ I Made Adikampana, *Pariwisata Berbasis Masyarakat* (Denpasar: Cakra Press, 2017), h. 2.

meningkatkan kualitas kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi dari kehidupan yang sebelumnya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat bukan hanya kemampuan seseorang saja yang harus diberdayakan atau dikembangkan, dalam proses pemberdayaan banyak hal yang harus dikembangkan atau ditingkatkan diantaranya kondisi ekonomi dan kondisi sosialnya juga perlu diberdayakan agar kehidupan masyarakat dapat terus berkelanjutan.⁶

Sesuai dengan rencana strategis manajemen pemberdayaan masyarakat mtahun 2010, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata adalah “upaya penguatan dan peningkatan kemampuan, peran dan inisiatif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan berperan aktif”. Aktor penerima manfaat dari pengembangan pariwisata berkelanjutan itu sendiri adalah masyarakat sekitar. Pokdarwis sendiri merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitasnya mereka berupaya meningkatkan berbagai aspek baik untuk masyarakat sekitar pariwisata ataupun kepada anggotanya sendiri. Pokdarwis juga berperan sebagai motivator, penggerak, serta motivator terhadap masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata.⁷

Masyarakat harus memiliki kemandirian dan kesadaran dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata yang terdapat di daerahnya tersebut. Sangatlah beruntung bagi mereka yang di daerahnya terdapat destinasi yang dapat diolah menjadi sebuah tempat wisata. Apabila masyarakat memiliki kemandirian serta kesadaran dalam menjaga dan mengembangkan wisata tersebut maka itu adalah keuntungan tersendiri bagi mereka untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat lokal. Memang masyarakat lokal tidaklah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan lembaga atau pemerintah dalam mengembangkan sebuah destinasi wisata namun jika masyarakat lokal mau bergerak bersama dalam sebuah pembangunan serta mampu

⁶ Ujjianto Singgih Prayitno et al., *Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekertariat Jenderal DPR RI, 2013), h. 8.

⁷ Firmansyah Rahim, *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata di Destinasi Pariwisata* (Jakarta: Direktur Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012), h. 4.

mengembangkan pembangunan tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin mereka akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka dari sektor wisata yang ada di daerah mereka tersebut. Masyarakat adalah sumber daya manusia yang bermanfaat untuk mengembangkan pariwisata dunia. Mereka adalah pemangku kebijakan (*stakeholder*) yang berperan sebagai tuan rumah, memiliki keragaman adat istiadat, tradisi, dan budaya. Sebab itu, masyarakat umum memiliki rencana strategis untuk membangun pariwisata di daerah mereka.

Jika dilihat di dalam perkembangannya, kini dunia pariwisata sudah mulai banyak yang mengandalkan keindahan alam yang ada di daerah mereka. Dengan antusias masyarakat lokal yang ingin mengembangkan sebuah destinasi wisata di daerahnya guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka. Pengembangan pariwisata Situ Pedongkelan merupakan salah satu dari beberapa pengembangan wisata situ yang ada di Kota Depok. Pengembangan pariwisata ini juga tidak luput dari sudut pandang masyarakat yang diuntungkan dan masyarakat lokal yang mendukung pariwisata yang bersangkutan. Salah satu upaya untuk mengembangkan Situ Pedongkelan ini dan memberdayakan masyarakat lokal di Situ Pedongkelan ini maka dibentuklah Pokdarwis. Dengan adanya potensi wisata yang dapat dijadikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung maka masyarakat lokal dan Pokdarwis di Situ Pedongkelanpun berkerjasama untuk mengembangkan dan membangun wisata Situ Pedongkelan.

Kemajuan dan perkembangan yang hari demi hari kian meningkat di wisata Situ Pedongkelan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pokdarwis Situ Pedongkelan dan masyarakat sekitar destinasi wisata agar dapat meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan taraf ekonomi mereka. Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pokdarwis Situ Pedongkelan yang berada di Kampung Areman, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ini membuat saya tertarik dengan program yang dilakukan oleh Pokdarwis Situ Pedongkelan dalam mengembangkan pariwisata Situ Pedongkelan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, saya tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Pengembangan Pariwisata Lokal Berbasis

Masyarakat di Situ Pedongkelan melalui Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) (Studi Kasus di Kampung Areman, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi umum masyarakat Pokdarwis Situ Pedongkelan?
2. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui wisata air Situ Pedongkelan?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan bagi Pokdarwis Situ Pedongkelan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata lokal wisata air Situ Pedongkelan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi umum masyarakat Pokdarwis Situ Pedongkelan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui wisata air Situ Pedongkelan yang dilaksanakan Pokdarwis Air Situ Pedongkelan.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan bagi Pokdarwis Situ Pedongkelan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata lokal wisata air Situ Pedongkelan.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian, yaitu:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pokdarwis Situ Pedongkelan melalui pariwisata lokal yang berada di Kampung Areman Kota Depok.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Agar penulis atau peneliti dapat memberikan pengalaman melalui skripsi ini, serta dapat merefleksikan ilmu yang sudah didapat agar dapat bermanfaat di dalam masyarakat kelak.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai tolak ukur dan acuan dalam mengembangkan potensi destinasi wisata di daerah mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka agar mereka lebih sadar dan peka terhadap kekayaan alam yang ada disekitar tempat tinggal mereka.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian atau kajian ini dapat digunakan sebagai bahan penelusuran atau referensi dalam pengembangan penelitian ilmiah di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan pemangku kepentingan lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun sebagai bahan kajian dan perbandingan dalam menulis penelitian ini, peneliti memiliki acuan dalam melakukan penelitian ini. Acuan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini berupa skripsi, artikel, dan jurnal terkait penelitian yang dilakukan:

Pertama, skripsi yang berjudul “Peran Pokdarwis Dalam Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Menari Dusun Tanon Desa Ngarawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang” yang ditulis oleh Dwi Mar’atus Sholikhah, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020. Kesimpulan yang saya dapatkan dari skripsi Dwi Mar’atus Sholikhah ini adalah bahwa Pokdarwis Desa Menari Dusun Tanon dapat memperkenalkan, melestarikan serta memanfaatkan potensi wisata yang terdapat di

Desa Wisata Menari Dusun Tanon. Selain itu, Pokdarwis Desa Wisata Menari Dusun Tanon juga dapat mengembangkan pengetahuan dan memberikan keterampilan kepada para anggota masyarakat yang ada di Dusun Tanon. Manfaat yang dapat diambil dengan adanya Pokdarwis Desa Wisata Menari Dusun Tanon yaitu pendapatan masyarakat Dusun Tanon menjadi meningkat, tingkat pendidikannya juga meningkat, serta dapat mendorong kemauan masyarakat untuk belajar.⁸

Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Dwi Mar'atus Sholikhah tentang Pokdarwis dalam pengembangan masyarakat dalam program atau kegiatan yang dikembangkan serta pengelolaan dan pengembangan paket wisata Desa Wisata Menari, pengelolaan *homestay*, pengelolaan perkebunan, pengelolaan industri sabun susu sapi, dan pengelolaan pasar rakyat. Upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Dusun Tanon.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Upaya Pokdarwis Bukit Pongonan Dalam Membina Masyarakat Sadar Wisata di Desa Pajaresuk, Kabupaten Pringsewu” yang ditulis oleh Elsa Alandera, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Kesimpulan yang saya dapatkan dari skripsi Elsa Alandera adalah menjelaskan bagaimana upaya Pokdarwis Bukit Pongonan dalam membina masyarakat dengan menerapkan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat. Adapun tujuan Pokdarwis Pongonan dalam membina masyarakat Desa Pajaresuk agar masyarakat Desa Pajaresuk dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka.⁹

Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Elsa Alandera tentang Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam membina masyarakat Desa Pajaresuk dalam program penyuluhan sadar wisata, pelatihan bimbingan teknologi, pelatihan pengolahan makanan. Dengan upaya pembinaan kepada masyarakat melalui

⁸ Dwi Mar'atus Sholikhah, “Peran Pokdarwis Dalam Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”, (*Skripsi* pada Fakultas Dakwah IAIN Salatiga, 2020), h. 1-139.

⁹ Elsa Alandera, “Upaya Pokdarwis Bukit Pongonan Dalam Membina Masyarakat Sadar Wisata di Desa Pajaresuk, Kabupaten Pringsewu”, (*Skripsi* pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 1-70.

program-program tersebut dapat lebih memupuk rasa kepemilikan bersama serta dapat menambah kesejahteraan dan perekonomiannya menjadi meningkat.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Pokdarwis Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” yang ditulis oleh Erlita Prasesti, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Kesimpulan yang saya dapatkan dari skripsi Erlita Prasesti adalah menjelaskan kerjasama yang dilakukan oleh Pokdarwis Desa Wisata Krebet dengan karang tarunanya. Pokdarwis Desa Wisata Krebet melakukan kerjasama dengan karang taruna dalam membangun dan mengembangkan Desa Wisata Krebet tersebut. Kerjasama yang dilakukan antara Pokdarwis dengan karang taruna Desa Krebet bertujuan dapat meningkatkan kemampuan, kesempatan serta kewenangan memecahkan masalah dan mengembangkan potensi melalui sumber daya manusia, alam, dan sosial sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Karang taruna Desa Krebet juga ikut serta dalam melakukan pendampingan kepada para pengunjung yang datang ke Desa Wisata Krebet.¹⁰

Perbedaan penelitian yang dikaji oleh Erlita Prasesti tentang Pokdarwis dalam mensejahterakan masyarakat dalam program wisata berbasis pendidikan, dalam program berbasis pendidikan ini para wisatawan diajarkan membuat kayu, bercocok tanam, dan belajar kesenian. Upaya tersebut dapat lebih memancing minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Krebet sehingga perekonomian Desa Wisata Krebet kian hari semakin meningkat.

F. Kerangka Teori

1. Pengembangan pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu kegiatan atau proses upaya dalam mengembangkan suatu objek pariwisata, yang dimana dalam kegiatan atau

¹⁰ Erlita Prasesti, “Partisipasi Masyarakat Pokdarwis Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Dusun Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta)” (Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h. 1-74.

proses-proses tersebut mengandalkan tiga pilar yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Dalam pengembangan pariwisata ketiga pilar tersebut harus bekerja sama dengan baik, apabila salah satunya tidak dapat bekerja sama maka sebuah objek pariwisata tidak akan dapat berkembang.¹¹

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.¹²

Menurut Anuar dan Sood, dalam pengembangan pariwisata, yang terpenting adalah terlibatnya masyarakat yang seringkali dilupakan dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, masyarakat terutama yang tinggal di daerah atau daerah tujuan wisata seringkali tidak merasakan manfaat dari pengembangan pariwisata di sekitarnya. Meski terlibat, peran mereka sangat minim, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata terkadang hanya menjadi penonton, namun pada saat yang sama mereka terpapar berbagai dampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat pembangunan pariwisata di daerahnya. Kondisi ini memunculkan pendapat tentang pentingnya pengembangan pariwisata masyarakat.¹³

2. Pariwisata berbasis masyarakat lokal

Pariwisata lokal merupakan jenis kepariwisataan yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.¹⁴ Menurut Davidson dan Maitland, destinasi pariwisata merupakan lokasi produksi, konsumsi, dan pola-pola pergerakan wisata. Selain itu destinasi pariwisata juga sebagai tempat hidup

¹¹ Muhammad Luthfi, "Pengembangan Pariwisata dan Dampak Sosial Ekonomi di Bandar Lampung," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen* Vol. 2, No. 1 (Juni, 2013) Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati, Bandar Lampung, h. 19.

¹² I Made Adikampana, *Pariwisata Berbasis Masyarakat*, (Denpasar: Cakra Press, 2017), h. 1.

¹³ Binahayati Rusyidi and Muhammad Fedryansyah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat," *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 1, No. 3 (Desember, 2018) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, h. 157–58.

¹⁴ Putu Eka Wirawan dan I Made Trisna Semara, *Pengantar Pariwisata* (Denpasar: IPB Internasional Press, 2021), h. 33.

masyarakat untuk bekerja serta melakukan kegiatan sosial dan budaya. Dengan demikian masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu destinasi pariwisata, sehingga dalam pengembangan destinasi pariwisata wajib mempertimbangkan berbagai elemen masyarakat. Sedangkan Dogra dan Gupta menyebutkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam suatu destinasi pariwisata.

Pike mengemukakan bahwa masyarakat di dalam destinasi pariwisata yang kemudian disebut dengan masyarakat lokal mempunyai potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk pariwisata. Budaya lokal, tinggalkan masyarakat, serta festival menyediakan keunikan dan sesuatu yang baru dari prospektif wisatawan. Masyarakat dengan pengetahuan dan kebijakan lokal akan lebih memahami produk pariwisata yang dikembangkan serta dampak yang ditimbulkan. Masyarakat lokal juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempromosikan produk destinasi pariwisata, karena masyarakat lokal adalah komponen utama pembentuk citra atau image destinasi pariwisata. Tosun dan Timothy menegaskan bahwa aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan adalah penekanan kepada pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini lebih fokus terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Melalui partisipasi masyarakat, pariwisata secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.¹⁵

Pariwisata dapat diartikan juga salah satu bidang yang mempunyai peluang besar sebagai faktor untuk memajukan perekonomian nasional. Sektor pariwisata diharapkan dapat berperan sebagai sumber andalan pemasukan devisa, dan merupakan bidang yang mampu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan investasi. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.¹⁶

¹⁵ I Made Adikampana, *Pariwisata Berbasis Masyarakat* (Denpasar: Cakra Press, 2017), h. 1-2.

¹⁶ Adenisa Aulia Rahma, "Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia", *Jurnal Nasional Pariwisata* Vol. 12, No. 1 (April, 2020) Fakultas Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, h. 1.

Menurut E. Guyer Freuler, pariwisata dalam artian modern merupakan fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam.¹⁷ Lalu Cooper mengemukakan, pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan.¹⁸

Berdasarkan teori para ahli di atas dapat disimpulkan secara umum pariwisata merupakan sebuah kegiatan yang mana kegiatan tersebut manusia melakukan sebuah perjalanan untuk sekedar bersenang-senang atau mencari hiburan bukan untuk mencari nafkah.

3. Pemberdayaan masyarakat

a.) Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu wujud partisipasi aktif masyarakat yang dilakukan dengan cara difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan dengan sasaran kepada mereka yang lemah, tertindas, tertinggal dalam pembangunan, dan tidak memiliki keberdayaan dalam mengakses sumberdaya dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka.¹⁹

Menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Parson juga mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang

¹⁷ Ismayanti, dkk., *Pariwisata dan Isu Kontemporer* (Jakarta: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015), h. 3.

¹⁸ Soedarso, dkk., "Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bojonegoro)," *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 7, No. 2 (November, 2014), h. 140-141.

¹⁹ Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, (Juni, 2011) Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, h. 24-25.

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan Sumodiningrat menyatakan bahwa hakikat dari pemberdayaan berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolak ukur normatif, struktural, dan substansial.²⁰

Pemberdayaan, sebagaimana telah diterjemahkan oleh para ahli lain, pada dasarnya didefinisikan sebagai berikut: “membantu seseorang memperoleh kekuatan untuk membuat keputusan dan menentukan tindakan yang akan diambil yang sehubungan dengan mereka, khususnya dengan mengurangi dampak individu dan hambatan sosial terhadap tindakan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka untuk menggunakan daya yang mereka miliki, termasuk mentransfer daya dari lingkungan.”²¹

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kelompok yang lemah agar memiliki kekuasaan dan dapat berpengaruh dalam suatu proses pembangunan. Pemberdayaan juga dilakukan agar masyarakat atau individu memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih berdaya. Adapun Strategi dalam melakukan Pemberdayaan adalah sebagai berikut:²²

a) Pemungkinan

Pemberdayaan dalam hal ini diperlukan untuk menciptakan suasana di mana potensi suatu masyarakat dapat berkembang secara optimal, sehingga terlepas dari hambatan struktural dan kultural yang dapat menghambatnya.

b) Penguatan

Dalam kaitan ini, perlu dilakukan pemberdayaan untuk membangun pengetahuan masyarakat dan kapasitas pemecahan masalah untuk memenuhi

²⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 29

²¹ Dedeh Maryani and Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 1-2.

²² Rauf A Hatu, “Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis)”, *Jurnal Inovasi* Vol. 7 No. 4 (Desember, 2010) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, h. 247-248.

tuntutan kehidupan. Dalam aspek pemberdayaan ini, pemberdayaan harus mampu mengembangkan kapasitas dan kemandirian masyarakat miskin.

c) Perlindungan

Dalam kaitan ini, pemberdayaan diperlukan untuk melindungi masyarakat dan kelompok yang lebih lemah dari penindasan oleh kelompok yang lebih kuat. Dalam hal perlindungan ini, persaingan antar kelompok juga sangat dihindari dan tidak ada diskriminasi.

d) Penyokongan

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat diberikan bimbingan dan dukungan sehingga dapat memenuhi peran dan kewajibannya. Dukungan ini diberikan untuk mencegah kelompok miskin atau kelompok yang lemah menjadi lebih lemah lagi.

e) Pemeliharaan

Aspek pemeliharaan ini memerlukan pemberdayaan untuk menjaga kondisi yang kondusif agar berbagai kelompok masyarakat dapat menjaga keseimbangan. Dalam hal ini, Pemberdayaan harus menjaga keharmonisan agar setiap kelompok dapat melakukan usaha.

b.) Pengertian masyarakat

David I Shill dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang tujuannya adalah untuk memperkuat, membantu dan meningkatkan diri. Orang Inggris menyebutnya dengan *society*. Sedangkan menurut Mircea dan Elliade, masyarakat adalah populasi yang relatif mandiri atau mandiri yang dicirikan oleh organisasi internal, wilayah, kekhususan budaya, dan rekrutmen seksual *society* atau masyarakat juga berarti *civilized community*, *civilized community* atau masyarakat madani, atau dalam bahasa *Encyclopedia of Religion* disebut komunitas perantara.²³

c.) Pemberdayaan masyarakat

²³ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001), h. 9.

Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ungkapan Pemberdayaan masyarakat digunakan sebagai terjemahan dari kata pemberdayaan bersama dengan ungkapan “pengentasan kemiskinan” Inpres No. 5/1993, yang kemudian dikenal dengan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan. Pemberdayaan masyarakat juga memiliki upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²⁴

Pemberdayaan dalam konteks sosial adalah kemampuan individu untuk berintegrasi ke dalam masyarakat dan membangun kapasitas masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat sebagian masyarakat yang tidak dapat lepas dari jebakan situasi saat ini. kemiskinan dan keterbelakangan. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁵

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam merencanakan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki hingga masyarakat itu sendiri memiliki kemandirian baik secara ekonomi ataupun sosial secara berkelanjutan.²⁶

Adapun menurut Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang

²⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 25-30.

²⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 40-41.

²⁶ Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Civis* Vol 1, No. 2 (Juli, 2011) Dosen Fisip Untag Semarang, h. 91.

memberdayakan. Mubyarto menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.²⁷

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat bawah dengan menerapkan nilai-nilai modern dan upaya pemberdayaan.

d.) Tujuan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat masyarakat yang lemah yang tidak memiliki keberdayaan. Kelompok-kelompok lemah yang dimaksud itu seperti kelompok masyarakat ekonomi rendah, kelompok penyandang cacat, kelompok minoritas etnis, dan orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Solomon berpendapat bahwa ketidakberdayaan terdapat dua faktor, ekstrinsik dan intrinsik, diantaranya yaitu dapat menyebabkan rasa tidak berdaya, yang terjadi karena penilaian negatif tentang orang ada sebagai akibat dari penilaian negatif tentang orang lain, dan pengalaman negatif dapat menyebabkan ketidakberdayaan. dalam interaksi seperti ini dapat menyebabkan antara korban kaum tertindas dengan sistem yang ada, lingkungan yang lebih luas selain mereka yang menindasnya dapat mengganggu peran dan tindakan kelompok tertentu. Situasi tersebut dapat menciptakan rasa ketidakberdayaan bagi kelompok tertindas untuk mengekspresikan atau memanfaatkan peluang yang ada di masyarakat.²⁸

e.) Tahap-tahap pemberdayaan

Dalam hal pemberdayaan, proses penilaian dapat dipimpin secara individu oleh tokoh masyarakat (*key person*), pemberdayaan masyarakat juga mempunyai tujuh tahapan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama, penyiapan tugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan

²⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 52.

²⁸ Rauf A Hatu, "Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teoritis)", *Jurnal Inovasi* Vol. 7 No. 4 (Desember, 2010) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, h. 245.

oleh *community worker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dilakukan.

3) Tahap pengkajian (*Assesment*)

Pada tahap ini dapat dilakukan melalui kelompok sosial. Dalam hal ini, perwakilan harus mencoba mengidentifikasi masalah kebutuhan dan sumber daya yang dirasakan oleh klien.

4) Tahap pemformulasian rencana aksi

Pada tahap ini, agen perubahan membantu setiap tim membentuk dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki masalah yang ada. Selain itu, agen juga membantu menuangkan idenya secara tertulis.

5) Tahap pelaksanaan (Implementasi) program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berperan sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

6) Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan formal dengan masyarakat sasaran. Pada tahap ini, proyek diharapkan segera dihentikan. Petugas harus tetap berhubungan, meskipun tidak secara teratur. Kemudian secara bertahap batasi kontak dengan komunitas lainnya.

7) Tahap penilaian

Penilaian sebagai proses pemantauan oleh warga dan pejabat terhadap program peningkatan masyarakat yang sedang berlangsung harus bersifat partisipatif. Diharapkan dengan partisipatif warga ini, sistem pemantauan internal komunitas dapat dikembangkan dalam waktu dekat, dan dalam jangka panjang dapat membuat komunitas yang lebih mandiri menggunakan sumber daya yang dimiliki.²⁹

4. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok Sadar Wisata atau yang biasa disebut juga dengan Pokdarwis merupakan suatu lembaga yang keberadaannya berada di tingkat masyarakat, oleh sebab itu anggota Pokdarwis itu sendiri biasanya masyarakat yang berada di sekitar destinasi pariwisata itu sendiri. Pokdarwis merupakan suatu lembaga yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap pariwisata yang berada di daerah tersebut. Selain memiliki tanggung jawab terhadap pariwisata yang berada di daerahnya Pokdarwis juga memiliki peran sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim yang kondusif agar pariwisata dapat berkembang serta dapat mewujudkan Sapta Pesona melalui pariwisata dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam pedomannya sendiri Pokdarwis memiliki dasar hukum, berikut dasar hukumnya:³⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966)
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
- 3) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

²⁹ Adi Isbandi Rukminto, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: LP FEUL, 2002), h. 54.

³⁰ Firmasyah Rahim, *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata di Destinasi Pariwisata* (Jakarta: Direktur Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012), h. 16.

- 4) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata
- 5) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014

Adapun pengertian lain Pokdarwis merupakan salah satu alternatif pengembangan pariwisata terkait kampanye sadar wisata. Mempromosikan pengembangan pariwisata dalam negeri oleh Pokdarwis melalui berbagai kegiatan, termasuk pengembangan masyarakat melalui kelompok swadaya dan inisiatif masyarakat yang mendorong pengembangan pariwisata. Pokdarwis adalah wadah bagi anggota masyarakat yang mencari nafkah melalui kegiatan pariwisata. Kelompok ini merupakan forum informal untuk bertukar pikiran, kegiatan, diskusi dan pengembangan untuk mencapai tujuan menjadikan daerah Anda sebagai objek wisata. *Tourism Awareness Group* adalah kendaraan untuk keterlibatan dan komunikasi sosial antara administrator.³¹

Pokdarwis juga memiliki tujuan diantaranya yaitu meningkatkan peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan yang ada di daerahnya serta memperkenalkan dan memanfaatkan daya tarik pariwisata yang ada di daerahnya masing – masing.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya dan menyelidiki data yang diperoleh. Dalam sebuah penelitian, Metode penelitian memainkan peran penting dalam pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan beberapa metode

³¹ Dias Setianingsih, dkk., “Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Untuk Pengembangan Wisata Air Terjun Simpang Kiri di Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang”, *Jurnal Vokasi* Vol. 1, No. 2 (Oktober, 2017) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, h. 88..

³² Firmasnsyah Rahim, *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata di Destinasi Pariwisata* (Jakarta: Direktur Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012), h. 18.

penelitian. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Suparlan menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola. Gejala-gejala sosial dan budaya dianalisis dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif.³³ Pada penelitian ini penulis akan meneliti pengembangan pariwisata lokal berbasis masyarakat yang dilakukan di Situ Pedongkelan melalui pemberdayaan Pokdarwis Situ Pedongkelan.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di Situ Pedongkelan Kampung Areman, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui wisata air Situ Pedongkelan yang dilakukan oleh Pokdarwis Situ Pedongkelan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – Oktober 2022.

Alasan dari peneliti memilih Situ Pedongkelan sebagai tempat penelitian karena peneliti tertarik dengan perkembangan serta kemajuan Situ Pedongkelan yang dilakukan oleh Pokdarwis Situ Pedongkelan dalam memberdayakan masyarakat sekitar melalui pembangunan-pembangunan dan program-program Pokdarwis Situ Pedongkelan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang telah didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah:

- a.) Observasi

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 34.

Menurut Supardi observasi adalah cara mengumpulkan informasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.³⁴

Penulis melakukan metode observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan data langsung ke lokasi penelitian namun tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut.³⁵ jadi penulis datang langsung ke tempat yang diteliti atau diamati namun, peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan objek yang diteliti dalam penelitian ini. Penulis melakukan observasi dimulai pada bulan Mei 2021. Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Depok di wisata air Situ Pedongkelan melalui Pokdarwis Situ Pedongkelan Kampung Areman, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

b.) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan komunikatif antara dua orang atau lebih yang sebelumnya sudah ditentukan tujuannya juga sudah dirancang agar tercipta interaksi tanya jawab dengan tujuan dapat menggali informasi yang diharapkan oleh pewawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah sebuah proses wawancara yang mengandalkan topik pada saat pembicaraan berlangsung.³⁶

Penulis datang dan mewawancarai para informan adalah wawancara yang dilakukan dalam skripsi ini. Kegiatan wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai para informan atau narasumber yaitu staff pelaksana pariwisata Dinas Pariwisata Kota Depok, juru Situ Pedongkelan, wakil ketua Pokdarwis Situ Pedongkelan sekaligus ketua Rt.005 Rw. 005 yang mewakili ketua Pokdarwis karena berhalangan sebab pekerjaannya, bendahara Pokdarwis Situ

³⁴ Muhammad Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 72.

³⁵ Bernadus Bin Frans Resi, "Teknik Pengumpulan Data", in *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 357.

³⁶ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Jurnal Aspirasi* Vol. 4, No. 2 (Desember, 2013) Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, h. 167-168.

Pedongkelan, ketua karang taruna Kelurahan Tugu, ketua karang taruna Rt.005 Rw. 005 1 sekertaris RT, 1 ketua RW, 3 orang pedagang di area Situ Pedongkelan dan 2 orang petugas sepeda air sekaligus anggota Pokdarwis Situ Pedongkelan. Pada kegiatan wawancara ini peneliti melakukan wawancara sesuai dengan pedoman yang peneliti butuhkan untuk dijadikan data yang nantinya digunakan untuk menganalisis. Dalam kegiatan wawancara ini peneliti bertanya kepada informan lalu direkam serta dicatat untuk dikumpulkan data-datanya.

c.) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diolah dengan menggunakan dokumen. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen yang mungkin atau mungkin tidak bertentangan dengan hasil wawancara. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.³⁷ Pada metode penelitian ini peneliti memperoleh data berupa foto hasil penelitian yang meliputi, foto arsip dokumen, foto kondisi Situ Pedongkelan, foto kegiatan Pokdarwis bersama masyarakat, dan foto hasil dan berlangsungnya program.

4. Sumber data

a.) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer ini juga didapatkan dari hasil observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti.³⁸ Adapun data primer yang didapatkan oleh penulis adalah data hasil wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh data primer peneliti dan narasumber yang bersangkutan bertemu secara langsung. Data primer ini juga merupakan data yang utama dalam penelitian.

b.) Data sekunder

³⁷ Sandi Hesti Sondak, “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Emba* Vol. 7, No. 1 (Januari, 2019) Fakultas dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi, h. 675.

³⁸ Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12, No. 1 (Juni, 2011) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, h. 45.

Data sekunder merupakan data yang terdapat dalam sebuah penelitian, namun data sekunder bukanlah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.³⁹ Data sekunder yang didapatkan oleh peneliti berupa buku, jurnal, arsip, catatan, dokumen-dokumen, dan sumber lainnya.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data mengorganisasikan data berdasarkan kategori-kategori dari data seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, menguraikannya dalam satuan-satuan, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sebagai berikut, mencari data secara sistematis dan merupakan proses pengorganisasian sehingga mudah untuk dipahami untuk diri sendiri dan orang lain.⁴⁰

Miles dan Huberman menggambarkan analisis data kualitatif sebagai berikut:⁴¹

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memutuskan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.

d. Verifikasi data

Verifikasi data adalah proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

³⁹ Edy Suandi Hamid dan Y. SriSusilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12, No. 1 (Juni, 2011) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, h. 45.

⁴⁰ Suci Arischa, "Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa Fisip* Vol 6, No. 1 (Januari-Juni 2019) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, h. 7.

⁴¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h. 3-4.

Untuk memudahkan penulisan proposal skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yang meliputi, gambaran umum Situ Pedongkelan, letak geografis dan demografi Situ Pedongkelan Kampung Areman Kelurahan Tugu, sarana dan prasaran, kehidupan sosial masyarakat, kondisi pendidikan, kondisi sosial agama, kondisi ekonomi, profil Pokdarwis Situ Pedongkelan, sejarah Podarwis Situ Pedongkelan, tujuan Pokdarwis Situ Pedongkelan, struktur Pokdarwis Situ Pedongkelan, program-program Pokdarwis Situ Pedongkelan.

BAB III mendeskripsikan tentang kondisi umum Pokdarwis Situ Pedongkelan. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yang meliputi, jumlah anggota, kondisi sosial Pokdarwis Situ Pedongkelan, kondisi pendidikan Pokdarwis Situ Pedongkelan, kondisi ekonomi Pokdarwis Situ Pedongkelan.

BAB IV menjelaskan pengembangan pariwisata Situ Pedongkelan oleh Pokdarwis Situ Pedongkelan. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab yang meliputi, peran Pokdarwis dalam pemberdayaan masyarakat di Situ Pedongkelan, tahap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokdarwis Situ Pedongkelan, manfaat program kegiatan Pokdarwis Situ Pedongkelan, faktor pendukung dan penghambat Pokdarwis Situ Pedongkelan.

BAB V Penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir penulis mencantumkan daftar pustaka sebagai referensi penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.